

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA TANJUNG RAMBUTAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

RAHMAT HIDAYAT SYAH

NIM. 10875004168

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
TAHUN 2012**

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA TANJUNG RAMBUTAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



Oleh:

RAHMAT HIDAYAT SYAH

NIM. 10875004168

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
TAHUN 2012**

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA TANJUNG RAMBUTAN KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

(Rahmat Hidayat Syah, 10875004168, Ilmu Administrasi Negara, 81 Halaman, 2011)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 merupakan tolok ukur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, karena di dalamnya telah diuraikan dengan jelas mengenai fungsi dari unsur pemerintahan desa, seperti fungsi kepala desa beserta perangkatnya dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan adalah peran serta masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan dan pemerintahan desa yang baik juga tidak terwujud. Jadi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa, maka dibutuhkan komunikasi, komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2003:2). Sebagai implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, penulis mengamati dan memperoleh data-data lapangan yang mengindikasikan bahwa terjadi ketidakefektifan dari pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam mewujudkan *good governance* yang dilatarbelakangi oleh; 1). Komunikasi yang kurang baik antara sesama anggota BPD, 2). Kepentingan individu dan kelompok dalam intern BPD, 3). Komunikasi BPD dengan masyarakat (partisipasi). Dalam menelaah masalah ini lebih dalam, penulis menjadikan masalah-masalah yang ada sebagai objek penelitian yang berjudul: “Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Apakah fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik?, 2). Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?. Jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang, Aparat Desa sebanyak 10 orang dan masyarakat sebanyak 95 orang dari 2.058 jiwa dijadikan sebagai sampel dari populasi yang ada. Data primer (lapangan) dan sekunder (studi kepustakaan) diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dianalisa secara deskriptif (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian dapatlah kesimpulan bahwa fungsi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPD, sehingga tujuan hidup bermasyarakat dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa tidak tercapai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah_robabil_’alamin, segala sembah dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA TANJUNG RAMBUTAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**. Shalawat dan salam tercurah kepada *uswatun hasanah* yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyyah menuju alam yang menjunjung tinggi akhlaqul_karimah dan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan semua pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dengan segala kelembutan penuh rasa cinta dan kasih sayang, ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Nursiah, S.Pd dan Ayahanda tercinta Syaharuddin, S.Ag, SH, yang tidak terbalaskan jasanya mulai sejak mengandung, membesarkan dan mendidik (menyekolahkan) penulis sampai penulis menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dengan tulus ikhlas untuk mengorbankan waktu dan pikiran dalam memberikan arahan dan nasihat, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Hanya do’a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dengan pahala yang besar.
3. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rusdi, S.Sos, MA, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tiada bosan-bosannya melayani dan memberi nasehat/arahan kepada mahasiswa/i.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak dan Ibu pegawai Rektorat dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pegawai pustaka yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan administrasi.
8. Bapak Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang telah banyak memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
9. Bapak Drs. H. Mahyiddin Usman, SH, MA, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Bapak/Ibu Hakim Tinggi beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan.
10. Kakanda Nelli Fitriah Syah, SE, Nurwahyuni Syah, SP dan Taufiq Wahyudi Syah, S.Pd serta adinda Rizki Muliadi Syah (kembaran penulis) dan Nurhuda Syah tercinta yang telah banyak membantu, memotifasi, mendukung, menasihati penulis selama hidup dari kecil sampai penulis menyelesaikan perkuliahan pada tingkat Strata Satu (S1), baik dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT jadikan kami sebagai anak-anak shaleh/ah yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allohmma Amin.
11. Kepada Ketua Pengurus Masjid As Salam beserta seksi-seksi dan warga Perumahan Melur Permai Palma Putri RW 16 Kelurahan Sidomulyo Barat-Tampan yang telah memberi amanah kepada penulis untuk menjadi Gharim (Takmir) Masjid As Salam selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Rinaldi, SE.I selaku Kepala Sekolah DTA/TPA As Salam beserta Ibu-Ibu majelis guru yang telah membantu dan memaklumi penulis dalam menjalani perkuliahan selama mengajar di DTA/TPA As Salam.
13. Pamanda Drs. Saharuddin, M.Ag dan Bibi Yennisma, S.Ag yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil selama penulis tinggal di Masjid As Salam.
14. Teman seperjuangan mulai dari SDN 017 Tanjung Rambutan, MTs Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, SMA 2 Kampar dan teman selama kuliah: Aisyah, M. Ridho, M. Rifki, Sufa Nabilla, Sri Yunita, Lia Rahmah, Nurus Shadri, Mohd. Sukran Mupid, Elvis Zulher, Jalisman, M. Jumri, M. Sikamri, Hasan Basri, Hardianti, dan Fitriani yang telah memberi penulis semangat untuk menjalani proses perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu perjuangan penulis sampai penulis menamatkan perkuliahan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis bermohon, semoga segala jasa baik dari semua pihak mendapat balasan pahala yang berlipat ganda, Amin Yaa Robbal'alamin.

Pekanbaru, Januari 2012
Penulis,

RAHMAT HIDAYAT SYAH
NIM. 10875004168

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Perumusan Masalah	12
I.3 Tujuan Penelitian	12
I.4 Manfaat Penelitian	12
I.5 Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Fungsi	15
II.2 Pemerintahan Desa	15
II.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
II.4 Fungsi BPD.....	19
II.5 <i>Good Governance</i>	21
II.5.1 Peristilahan dan Pengertian <i>Good Governance</i>	21
II.5.2 Pentingnya Menegakkan <i>Good Governance</i> di Tingkat Desa	21
II.5.3 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	23
II.6 Defenisi Konsep.....	25
II.7 Indikator Penelitian.....	26
II.8 Hipotesa	27

BAB III: METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian	28
III.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28

III.3 Jenis dan Sumber Data.....	28
III.4 Teknik dan Pengumpulan Data.....	28
III.5 Populasi dan Sampel.....	29
III.6 Analisis Data.....	31

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Letak Geografis	32
IV.2 Keadaan Demografi	32
IV.2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Rambutan	32
IV.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
IV.2.3 Mata Pencarian Penduduk	35
IV.2.4 Kehidupan Keagamaan	36
IV.3 Pemerintahan Desa	39
IV.4 Badan Permusyawaratan Desa.....	41

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden.....	45
V.1.1 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
V.1.2 Jenis Kelamin.....	46
V.1.3 Tingkat Usia.....	47
V.1.4 Jenis Pekerjaan	47
V.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	48
V.2.1 Legislasi	50
V.2.2 Pengawasan	57
V.2.3 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	64
V.3 Rekapitulasi Tanggapan Reponden Tentang Fungsi BPD Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	70

V.4	Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan <i>good governance</i> di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	73
V.4.1	Faktor Internal BPD	73
V.4.2	Faktor Eksternal BPD	76

BAB VI: PENUTUP

VI.1	Kesimpulan	78
VI.1	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Daftar Jumlah Aparat Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.....	6
Tabel I.2 : Absensi Rapat BPD Dengan Aparat Desa Tanjung Rambutan	7
Tabel I.3 : Daftar Tingkat Kehadiran Rapat Rutin Anggota BPD Tanjung Rambutan Tahun 2011.....	8
Tabel I.4 : Program Pembangunan Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar.....	8
Tabel I.5 : Draft Peraturan Desa Masalah Penanganan Pekat	9
Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Tanjung Rambutan	29
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Tanjung Rambutan	33
Tabel IV.2 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Rambutan .	35
Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Tanjung Rambutan.....	36
Tabel IV.5 : Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tanjung Rambutan	38
Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Rambutan.....	38
Tabel IV.7 : Daftar Nama Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan	39
Tabel IV.8 : Daftar Nama-Nama Ketua RW dan RT Desa Tanjung Rambutan	40
Tabel IV.9 : Keanggotaan BPD di Desa Tanjung Rambutan.....	42
Tabel V.1 : Tingkat Pendidikan Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat	45
Tabel V.2 : Jenis Kelamin Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat	46

Tabel V.3	: Tingkat Usia Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat.....	47
Tabel V.4	: Jenis Pekerjaan Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat	47
Tabel V.5	: Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan dalam Membuat Rancangan Peraturan Desa	51
Tabel V.6:	Tanggapan Responden Tentang Tahapan dan Aturan dalam Merumuskan Peraturan Desa.....	52
Tabel V.7:	Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Rapat yang Dilaksanakan BPD.....	54
Tabel V.8	: Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Dalam Membatalkan Peraturan Desa	55
Tabel V.9	: Tanggapan Responden Tentang BPD Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat.....	55
Tabel V.10	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Legislasi	56
Tabel V.11	: Absensi Rapat BPD Desa Tanjung Rambutan	56
Tabel V.12	: Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.....	58
Tabel V.13	: Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengawasi Roda Pemerintahan.....	58
Tabel V.14:	Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.....	60
Tabel V.15	: Draft Peraturan Desa Masalah Penanganan Pekat	61
Tabel V.16	: Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.....	62
Tabel V.17	: Tanggapan Responden Tentang BPD Menjalankan Fungsi Pengawasan	62
Tabel V.18	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Pengawasan.....	64

Tabel V.19 :	Tanggapan Responden Tentang BPD Pernah Menampung Aspirasi Masyarakat.....	66
Tabel V.20 :	Tanggapan Responden Tentang Pernah Menyampaikan Aspirasi Kepada BPD	66
Tabel V.21 :	Tanggapan Responden Tentang Aspirasi yang Disalurkan Ke Instansi Berwenang.....	67
Tabel V.22 :	Tanggapan Responden Tentang BPD Turun Langsung untuk Menampung Aspirasi	68
Tabel V.23 :	Tanggapan Responden Tentang BPD Menetapkan Peraturan/Program Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat	69
Tabel V.24 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	70
Tabel V.25 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.....	72
Tabel V.26 :	Sarana dan Prasarana BPD di Desa Tanjung Rambutan.	76

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, maka yang paling mendasar dari otonomi daerah itu adalah adanya kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Pelaksanaan otonomi secara nyata akan menciptakan suatu kondisi dimana segala kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah, hal ini memiliki makna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Asshiddiqie (2007:491) dalam kenyataannya di masyarakat, memang terdapat pula keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah, kasatuan masyarakat yang dimaksud adalah: Desa di Jawa dan Madura atau istilah Gompang di Aceh, Huta di Tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatra Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan lain sebagainya. Sekarang kata desa sudah menjadi bahasa yang umum dipakai untuk menanamkan kesatuan masyarakat terendah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat”. Di dalam penjelasannya dikatakan “yang dimaksud dengan ‘Badan Permusyawaratan Desa’ dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa seperti yang diamanatkan oleh Pasal 216 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengintruksikan untuk membuat Peraturan Pemerintah dalam mengatur lebih lanjut tentang desa. Pengaturan tentang desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan kewenangan tiap-tiap badan penyelenggara pemerintahan desa, baik pemerintah desa maupun BPD yang bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur merata.

Hubungan yang ideal dalam kehidupan di tingkat desa ternyata tidak hanya sampai pada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan unsur BPD saja, karena kedua unsur ini hanyalah sebagai fasilitator dan administrator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun unsur yang teramat penting

diikutsertakan adalah partisipasi dari masyarakat secara utuh. Partisipasi masyarakat adalah yang paling menentukan dari jalannya roda pemerintahan. Artinya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa merupakan bagian terpenting untuk terlaksananya pembangunan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pihak pemerintah desa dan BPD dengan efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan kata lain perlu dibangun adanya kerjasama dan partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antara unsur-unsur yang ada. Dalam bahasa akademisnya hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik perlu dibangun adanya sebuah mekanisme dialog atau komunikasi antara ketiga unsur ini, sehingga tiap-tiap unsur sama-sama merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam pembangunan desa.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah paradigma baru yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik, baik dalam skala besar maupun kecil. Terciptanya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari apa saja yang ingin dicapai oleh suatu negara dan daerah. Dalam hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya tata pemerintahan desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas

pemerintahan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa yang merupakan tujuan dari pemberian hak otonomi desa yang akan menjadi tonggak terciptanya masyarakat indonesia yang sejahtera.

Bila dikaitkan antara fungsi BPD dengan paradigma *good goovenance* ini memang tidak terdapat keterkaitan yang mendasar, hal ini disebabkan oleh kedudukan antara kedua unsur tersebut mempunyai lingkup dan pengertian yang berbeda. Meskipun demikian, antara fungsi BPD dengan konsep *good governance* adalah sisi yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, karena *good governance* adalah paradigma yang memiliki konsep yang sangat bersesuaian dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi BPD yang juga merupakan tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang tidak lain adalah memberikan keterbukaan dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu sendiri serta melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dalam pembangunan yang ada di desa.

Hubungan antara kedua hal ini secara praktek memiliki kesamaan dari sisi pencapaian sasaran yang diinginkan. Karena secara yuridis konsep *good governance* ini menjadi sponsor dan promotor dalam membantu terciptanya kehidupan yang demokratis. Hal ini terlihat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Karena asas umum

penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang tersebut, yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah barangkali sisi yang menghubungkan antara fungsi BPD dengan paradigma *good governance*.

Sejalan dengan hal tersebut, hadirnya BPD diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangganya sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pada prinsipnya keberadaan BPD hendaknya mampu memberikan perubahan dan pembaruan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi pembangunan fisik maupun mental di berbagai bidang untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur, sebagaimana janji Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd Ayat 11:



Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

Sehingga keinginan untuk memiliki otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonom untuk menciptakan kemakmuran dapat diraih.

Untuk itu aparat desa sangat berperan di dalam hal tersebut dan jumlah aparat desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.1 Daftar Jumlah Aparat Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab. Kampar

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Anggota BPD	7	
4	Kepala Desa	1	
5	Sekretaris Desa	1	
6	Kepala Urusan	4	4 Bidang
7	Kepala Dusun	4	4 Dusun
	Jumlah	19	

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab XI bagian ketiga Pasal 209 menjelaskan bahwa BPD berfungsi: menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 yang mengatur tentang BPD yang merupakan suatu badan legislatif desa yang berperan sangat penting terhadap kemajuan suatu desa yang mana berfungsi sebagai pembuat peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan dan keputusan yang dibuatnya tersebut menjadi landasan dan pedoman di dalam menjalankan pemerintahan desa. Apabila peraturan desa yang dirumuskannya tersebut lebih mementingkan kepentingan masyarakat, secara otomatis masyarakat akan lebih maju dan perkembangan suatu desa tersebut akan lebih cepat. Disamping itu BPD

juga mempunyai tugas mengayomi, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keanggotaan dari BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berjumlah sebanyak 9 orang yang merupakan mitra kepala desa dalam memajukan pembangunan desa. Namun dalam pengamatan dan data yang penulis lihat menggambarkan adanya indikasi ketidakharmonisan antara sesama anggota BPD, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel I.2 Absensi Rapat BPD Dengan Aparat Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab. Kampar Tahun 2011

No.	Bulan	Unsur	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari	Anggota BPD	9	5	4
		Aparat Desa	10	5	5
2	Mei	Anggota BPD	9	4	5
		Aparat Desa	10	6	4
3	Agustus	Anggota BPD	9	4	5
		Aparat Desa	10	4	6

Sumber: Ketua BPD Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran baik dari unsur BPD maupun dari unsur aparat desa sangatlah tidak sesuai dengan jumlah yang ada, sehingga dari tingkat kehadiran ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan ditetapkan.

BPD yang merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat mempunyai gagasan untuk bisa menampung dari apa saja yang bersifat membangun. Maka dalam upaya ini BPD Desa Tanjung Rambutan telah menetapkan satu bulan sekali untuk mengadakan rapat rutin bulanan dalam melaksanakan fungsinya dan juga untuk melakukan evaluasi yang bersifat *intern* terhadap kinerjanya secara berkala. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel I.3 Daftar Tingkat Kehadiran Rapat Rutin Anggota BPD Tahun 2011

No.	Bulan	Agenda	Anggota	Tidak hadir	Persentase (%)
1	Januari	Evaluasi & lainnya	9	4	44.4 %
2	Februari	Evaluasi & lainnya	9	6	66.6 %
3	Maret	Evaluasi & lainnya	9	5	55.5 %
4	April	Evaluasi & lainnya	9	5	55.5 %
5	Mei	Evaluasi & lainnya	9	6	66.6 %
6	Juni	Evaluasi & lainnya	9	3	33.3 %
7	Juli	Evaluasi & lainnya	9	4	66.6 %
8	Agustus	Evaluasi & lainnya	9	3	33.3 %
9	September	Evaluasi & lainnya	9	4	44.4 %
10	Oktober	Evaluasi & lainnya	9	5	55.5 %

Sumber: BPD Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran dari anggota-anggota BPD sangat rendah sekali. Hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak mestinya terjadi, karena BPD merupakan cikal bakal dan juga titik sentral dalam upaya pelaksanaan pembangunan di desa sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun aspirasi masyarakat yang telah ditampung dan lalu kemudian disepakati oleh BPD Tanjung Rambutan adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Program Pembangunan Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar

No.	Jenis Pembangunan	Volume/ Anggaran (Rp.)	Realisasi
1.	Pembangunan Poskesdes	Rp. 78.000.000,-	Rp. 65.000.000
2.	Perbaikan Jalan Desa	2.350 M	1.850 M
3.	Pembangunan Kantor Desa	Rp. 95.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
4.	Peremajaan Bangunan Fisik Masjid	Rp. 55.000.000,-	Rp. 35.000.000,-

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari data di atas dapat dilihat bahwa program desa yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan masih terdapat ketidaksesuaian antara volume atau anggaran yang baku dengan target pencapaian pengerjaan pembangunan. Berikut adalah daftar peraturan desa yang telah dirumuskan oleh BPD bersama pemerintah desa:

Tabel I.5 Draft Peraturan Desa Masalah Penanganan Pekat

No.	Bentuk Larangan	Sanksi/Denda
1	Judi	Rp. 300.000
2	Miras	Rp. 150.000
3	Zina	Dikeluarkan dari Kampung
4	Pergaulan Bebas	Rp. 250.000
5	Tanggul /Polisi Tidur	Rp. 75.000
6	Sabung Ayam	Rp. 50.000
7	Kebut-kebutan dan Knalpot Modif	Rp. 125.000
8	Buka Warung (Selama Ramadhan)	Rp. 50.000

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel-tabel yang telah penulis catutkan di atas jelas bahwa terlihat berupa kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam hal komunikasi antara sesama anggota BPD dan hubungan antara BPD dengan masyarakat, ini berarti bahwa komunikasi antara kedua unsur tersebut kurang baik. Faktor utama yang membuat hubungan dan komunikasi antara kedua unsur tersebut tidak harmonis adalah:

1. Masalah komunikasi antara sesama anggota BPD.
2. Masalah komunikasi antara masyarakat dengan BPD.
3. Masalah kepentingan individu dan kelompok.

(berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2011 dengan Bapak H. Abdullah Ali selaku Ketua BPD Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

Masalah-masalah diatas jelas sangat bertentangan dengan fungsi BPD sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 sebagai berikut:

Wewenang BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pembuhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa adalah:

1. Meminta keterangan kepada kepala desa
2. Menyatakan pendapat.
3. Mengajukan rancangan peraturan-peraturan desa.
4. Mengajukan pertanyaan.
5. Menyampaikan usul dan pendapat.
6. Memilih dan dipilih.
7. Memperoleh tunjangan.

Kewajiban anggota BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa antaranya adalah:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan

mentaati segala peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
4. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga noma-norma dan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dari masalah-masalah yang berkembang pada BPD Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, maka dapat diasumsikan bahwa fungsi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik, karena mestinya BPD dengan profesional harus bisa membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Karena penulis melihat kurang harmonisnya komunikasi antara sesama anggota BPD. Sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*) kurang berjalan

secara maksimal. Maka penelitian ini penulis beri judul: "Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar".

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

I.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

I.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu tentang tata

pemerintahan di tingkat desa pada umumnya serta menambah cakrawala pemikiran penulis dalam bidang administrasi dan tata pemerintahan.

Secara praktis

Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan fungsi BPD, khususnya Desa Tanjung Rambutan.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan skripsi diantaranya berupa Pengertian Fungsi, Pemerintahan Desa, BPD, Fungsi BPD, *Good Governance*, Definisi Konsep, Indikator Penelitian dan Hipotesa.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Analisis Data.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti seperti Letak Geografis, Keadaan Demografi, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Identitas Responden, Fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Rekapitulasi Tanggapan Reponden Tentang Fungsi BPD Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB VI Penutup

Pada bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian untuk lebih baik kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Fungsi

Fungsi menurut Gie (1982:135) adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktifitas-aktifitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada tanggung jawab seorang pejabat atau organisasi.

Soekanto (1990:268) fungsi meliputi norma yang dilambangkan dalam posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa bisa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Fungsi menurut Rivai (2004:140) diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Kemudian menurut Thoha (1990:25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

II.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mengurus dan mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas pembantuan jalannya pemerintahan menurut atas otonomi yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dari pemerintahan desa terhadap masyarakat dan untuk terlaksananya hal tersebut maka diperlukan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa ”desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Widjaja (2002:67) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang langsung di bawah camat, dan berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerintahan desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan membentuk susunan pemerintahan desa dalam melayani masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia.

Dalam mengamati hal tersebut bahwa menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan di desa tanpa memperhatikan perbedaan adat istiadat setempat akan kurang memberikan nuansa kehidupan pada masyarakat tersebut. Tidak dapat disamakan antara desa di Jawa dan luar Jawa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Perbedaan ini sampai sekarang masih ada. Dalam kenyataannya, Undang-Undang tentang pemerintahan desa ini tidak mencerminkan jiwa dan semangat ” hak-hak asal-usul dalam daerah beristimewa” dan tidak memperhatikan kekuatan adat setempat. (Widjaja, 2002:12)

Adapun bentuk dari susunan pemerintahan desa tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 7 menyebutkan antara lain:

1. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri atas:
 - a. Unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan atau tata usaha.
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan.
 - c. Unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam membantu kepala desa yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat desa.

II.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kusworo (2004:19) dalam Sadu Wasistiono (2001:52) mengatakan secara konsepsional BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa karena memiliki kedudukan yang sejajar diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip *“check and balance”*.

Menurut Nurcholis (2005:239) BPD adalah badan pembuat kebijakan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan seperti RT/RW, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sama-sama mengatur tentang

pemerintahan daerah yang mana materi undang-undang tersebut juga mengatur tentang pemerintahan desa. Penggantian dari undang-undang ini tergolong cepat karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini baru mulai aktif berlaku pada awal tahun 2001 di seluruh pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 istilah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 undang-undang ini yang menyatakan bahwa “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, bersama kepala desa, menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat”. Di dalam penjelasannya dikatakan yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan BPD selaku perwujudan lembaga legislatif di desa juga relatif baru bagi masyarakat, masyarakat desa yang terbiasa dengan musyawarah dalam lembaga adat maupun dalam lembaga formal yang telah ada sebelumnya baik di masa kolonial maupun di masa reformasi seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa. Tetapi sayangnya Lembaga Musyawarah Desa dalam Undang-Undang ini hanya sebatas formalitas dari unsur pemerintahan saja, karena di dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa “Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa” selanjutnya Ayat 3 mengatakan “Sekretaris

Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa”.

Pengaturan seperti ini jelas sekali tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Hal ini juga sangat tidak mencerminkan suatu keadilan dalam berdemokrasi dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran Ayat 159:



Artinya: Karena itu, maafkankanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

II.4 Fungsi BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa ditegaskan fungsi BPD adalah: Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pembuhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa adalah:

1. Meminta keterangan kepada kepala desa.
2. Menyatakan pendapat.
3. Mengajukan rancangan peraturan-peraturan desa.
4. Mengajukan pertanyaan.
5. Menyampaikan usul dan pendapat.
6. Memilih dan dipilih.
7. Memperoleh tunjangan.

Kewajiban anggota BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa antaranya adalah:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
4. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma-norma dan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

II.5 Good Governance

II.5.1 Peristilahan dan Pengertian *Good Governance*

Penggunaan istilah dalam membahas suatu objek kajian sangat penting sekali, terutama untuk memberikan batasan terhadap objek yang sedang kita bahas. Begitu juga dengan pengistilahan *good governance*.

Menurut Putra (2009:43) *good governance* merupakan suatu konsep rasional. Sebuah konsep yang lahir dari proses rasional manusia (meski tidak berarti bahwa karena lahir dari proses rasional, lantas bersifat rasional). Dan seperti konsep rasional lainnya, konsep *good governance* juga mengandung dalam dirinya suatu cara pandang dunia yang kohesif dan komprehensif, sehingga ia berwatak ideologis

Dikutip dari buku karangan Ndraha (2003:69) kata kerja bahasa Inggris *govern* (memerintah) berasal dari kata lain *gubernare* atau *gerik kyibern*, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi "memerintah" disini mengemudikan. Kata bendanya adalah *governance* (latin gubernantia) menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata kerja *govern* digunakan di lapangan politik, kata bendanya menjadi *government*. *Governance* lebih sebagai gejala sosial, sedangkan *government* gejala politik.

II.5.2 Pentingnya Menegakkan *Good Governance* di Tingkat Desa

Salah satu persoalan yang tengah dihadapi pada masa transisi sekarang adalah munculnya rasa saling tidak percaya (*distrust*) antar komponen bangsa baik secara vertikal maupun horizontal. Proses pengaturan kembali hubungan antara pusat-daerah yang lebih demokratis melalui pemberlakuan otonomi daerah (desentralisasi) misalnya, ternyata tidak membuat gejala tersebut menyusut.

Masyarakat akhirnya terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut juga berimbas di tingkat desa.

Sejalan dengan semangat desentralisasi tersebut, pemerintah mencoba untuk mengembalikan hancurnya rasa saling percaya yang demikian akut menjangkiti masyarakat. Tetapi cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, hasilnya tidak terlalu signifikan. Konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bisa dijadikan salah satu strategi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang telah terlanjur memudar.

Di dalam konsep *good governance* pemerintah hanya salah satu unsur dalam menjalankan pemerintahan. *Good governance* juga mensyaratkan adanya partisipasi semua elemen masyarakat dalam pemerintahan desa. Pertemuan, dialog, negosiasi yang merupakan cerminan dari musyawarah antar elemen masyarakat desa masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, pemerintah desa, dan BPD menjadi alur yang secara operasional diharapkan dapat melahirkan rumusan program pembangunan desa. Selain itu, dengan program tersebut salah kaprah atas makna desentralisasi bisa diluruskan, dengan mengembalikan desentralisasi ke dalam semangat demokratisasi. Namun harus diakui bahwa *governance* adalah wacana baru dimana masyarakat masih awam tentang apa dan bagaimana *governance*. Terlebih, bagaimana mengoperasikannya sehingga menjadi *good governance*.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan alasan mengapa pentingnya menegakkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa:

- a. Karena selama masa orde baru di tingkat desa hanya dikembangkan

pemerintah yang baik (*good government*) saja dan belum menyertakan partisipasi masyarakat sehingga transparansi kepada masyarakat belum ada.

- b. Karena pada sekarang ini sedang dilaksanakan otonomi daerah dimana desa dijadikan titik penting dalam otonomi daerah.

Otonomi daerah tanpa adanya penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menyebabkan pemerintahan desa terlalu memperlihatkan otoritasnya dalam pemerintahan desa. Jika tidak dikembangkan pola hubungan yang baik dari semua kelembagaan desa, maka pemerintah desa akan tidak ada yang mengontrol. Dengan adanya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan pemerintah desa lebih membuka pintu kepada masyarakat untuk ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan desa. Dengan demikian semangat yang melingkupi dalam pelaksanaan otonomi desa adalah adanya keseimbangan peran antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan yang ada pada tingkat desa dalam pengelolaan pemerintahan desa.

II.5.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut buku karangan dari Sedarmayanti (2003:7) UNDP mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. *Particisipation.*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini seperti ini dibangun di atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law.*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,

terutama hukum hak azazi manusia.

3. *Transparency.*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. *Responsiveness.*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.

5. *Cosensus Orientation.*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur.

6. *Effectiveness and efficiency.*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. *Accountability.*

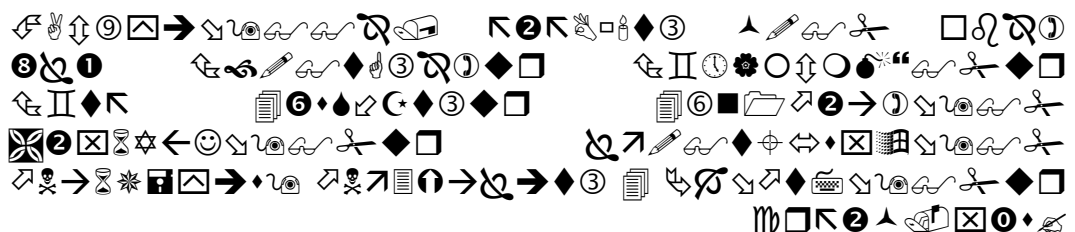
Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan ini untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. *Strategic vision.*

Para pemimpin dalam publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari konsep *good governance* ini menyadarkan kita pada kebenaran Al-

Qur'an dalam Surat An-Nahl Ayat 90:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Oleh karena itu, hubungan yang ideal dalam kehidupan di tingkat desa adalah keterlibatan semua unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembangunan desa. Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Dalam bahasa akademis hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan istilah "*ta'aawanu 'alal birri*". Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 2:

II.6 Defenisi Konsep

1. BPD adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat yang berfungsi:
 - Menjaga, mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang

di desa.

- Membuat peraturan desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1”).

3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan BPD.

4. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

II.7 Indikator Penelitian

Indikator penelitian merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah fungsi BPD dengan indikator:

1. Legislasi

- Membuat rancangan peraturan desa.
- Mengetahui aturan dalam membuat peraturan desa.
- Mengikuti rapat BPD.

- Ikut membatalkan peraturan desa.
- Melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa.

2. Pengawasan

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.
- BPD meminta perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban kepala desa.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.
- Menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan.

3. Menyampaikan Aspirasi

- Menerima aspirasi dari masyarakat.
- Menyampaikan aspirasi ke BPD.
- Menyalurkan aspirasi kepada instansi yang berwenang.
- Turun langsung menjumpai masyarakat untuk menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
- Menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan.

II.8 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka penulis mengambil hipotesa yaitu: "Diduga Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Belum Tercapai Karena Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Rendah".

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survei. Yaitu penelitian secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan fakta dengan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti dalam penelitian.

III.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 51 pada bulan Oktober-Desember 2011.

III.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau sumber kedua yaitu buku-buku maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti mengenai demografi Desa Tanjung Rambutan.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian atau perumusan masalah yang timbul.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama yang dilakukan langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3. Kuisioner

Yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi sebagai data primer guna untuk mendapatkan informasi yang akan diolah untuk membantu pemecahan masalah dalam penelitian ini.

III.5 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2005:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah jumlah masyarakat sebanyak 2.058 jiwa, anggota BPD sebanyak 9 orang dan Aparat Desa sebanyak 10 orang. Untuk pengambilan sampel dari jumlah masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk anggota BPD dan aparat desa dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Tanjung Rambutan

No.	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Aparat Desa	10	10	100%
2	Anggota BPD	9	9	100%
3	Masyarakat	2.058	95	10%
	Jumlah	2.077	114	

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Tahun 2011

Untuk masyarakat yang berjumlah 2.058 jiwa, penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% dengan jumlah masyarakat sebesar 2.058 orang maka didapatkan sampel sebesar:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2.058}{1 + 2.058(10\%)^2}$$

$$n = \frac{2.058}{1 + 2.058(0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.058}{1 + 2.058(0,01)}$$

$$n = \frac{2.058}{1 + 20,58}$$

$$n = \frac{2.058}{21,58}$$

$$n = 95,4 = 95 \text{ orang}$$

III.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analistik yang diawali dengan pemaparan tentang informasi dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian dianalisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi dan angka-angka dan diolah ke dalam bentuk tabel dan bagan yang disertai dengan penjelasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Letak Geografis

Desa Tanjung Rambutan berada di wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan luas wilayah $12 \text{ km} \times 2,2 \text{ km} = 26.400.000 \text{ m}^2$. Daerah seluas ini terdiri dari semak belukar, lahan pertanian, lahan perkebunan dan tanah perumahan.

Desa ini sebagian terdiri dari daratan dan sebagian lagi terdiri dari dataran tinggi dan dialiri sebuah anak sungai dari sungai Kampar. Desa Tanjung Rambutan mempunyai batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Jalai/Sungai Kampar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Kubu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Belah.

IV.2 Keadaan Demografi

IV.2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Rambutan

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam

proses pembangunan.

Desa Tanjung Rambutan dihuni oleh penduduk asli dan hanya sebagian kecil saja penduduk yang berasal dari luar daerah. Penduduk Desa Tanjung Rambutan berjumlah 2.077 jiwa, yang terdiri dari 1.012 jiwa laki-laki dan 1.065 jiwa perempuan. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki di Desa Tanjung Rambutan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Rambutan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1.	Laki-laki	1.012	48,72 %
2.	Perempuan	1.065	51,27%
Jumlah		2.077	100%

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas memperlihatkan jumlah bahwa penduduk di Desa Tanjung Rambutan menurut jenis kelamin, yang mana perempuan lebih banyak jumlahnya yaitu 1.065 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 1.012 jiwa.

IV.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan wilayah tersebut. Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perseorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu masyarakat dalam bernegara ditentukan oleh

pendidikan.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia. Bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah penduduk Desa Tanjung Rambutan yang berjumlah 2.077 jiwa tersebut yang telah mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	TK	88	13,68%
2.	SD	307	47,74%
3.	SLTP	134	20,83%
4.	SLTA	68	10,57%
5.	Mahasiswa	46	7,15%
Jumlah		643	100%

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Rambutan sebanyak 643 jiwa (30,95%) mengenyam pendidikan formal dengan rician; yang mengenyam pendidikan TK sebanyak 88 jiwa, 307 jiwa mengenyam pendidikan SD, 134 jiwa mengenyam pendidikan SLTP, 68 jiwa mengenyam pendidikan SLTA dan 46 jiwa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Tanjung Rambutan. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana yang memadai.

Pada umumnya, sarana tersebut berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Desa Tanjung Rambutan bisa dikatakan hampir seluruhnya tersedia kecuali perguruan tinggi, tetapi sarana pendidikan yang tersedia sudah dapat dikatakan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang ada telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Desa Tanjung Rambutan pada usia sekolah. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Rambutan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	MAN	1	14,30%
2	SD	2	28,60%
3	MDA	3	42,80%
4	TK	1	14,30%
Jumlah		7	100%

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang paling banyak adalah bangunan gedung sekolah MDA sebanyak 3 buah, berikutnya gedung SD sebanyak 2 buah, selanjutnya MAN 1 buah dan TK sebanyak 1 buah. Dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati pendidikan.

IV.2.3 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Tanjung Rambutan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih leih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Rambutan

dapa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Tanjung Rambutan

No.	Mata Pecaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1.309	63,02%
3	PNS	21	1,01%
4	Pegawai Swasta	3	0,14%
5	TNI	2	0,09%
6	POLRI	4	0,19%
7	Pol. PP	9	0,43%
8	Pedagang	73	3,51%
Jumlah		1.421	68,41%

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Tanjung Rambutan bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1.309 orang, 433 orang sebagai pelajar/mahasiswa, 21 orang sebagai PNS, 3 orang sebagai pegawai swasta, 2 orang sebagai TNI, 4 orang sebagai POLRI, 9 orang sebagai Pol. PP, 73 orang pedagang dan selebihnya pelajar/mahasiswa sebanyak 433 dan anak-anak sebanyak 223 orang yang tidak masuk dalam kategori bekerja.

IV.2.4 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan

umat beragama, toleransi dan kerukunan ini bukan berarti mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada falsafah Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan antar umat beragama itu adalah:

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Agama juga merupakan hubungan antara mahluk dengan Khaliq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula tingkah laku sehari-harinya. Dengan demikian dapat difahami bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, karena nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa dan apabila suatu perbuatan tidak sesuai dengan nilai keagamaan maka masyarakat akan menanggapi sebagai perbuatan yang tercela.

Dari data pemeluk agama di Desa Tanjung Rambutan, 100 % penduduk Desa Tanjung Rambutan beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tanjung Rambutan

No.	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	2.077	100%
2	Budha	-	0%
3	Protestan	-	0%
4	Katholik	-	0%
5	Hindu	-	0%
6	Konghucu	-	0%
Jumlah		2.077	100%

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pemeluk agama di Desa Tanjung Rambutan seluruhnya beragama islam sebanyak 2.077 jiwa.

Untuk menjalankan ritual keagamaan, masyarakat sangat memerlukan tempat peribadatan sebagai sarana ibadah. Banyaknya tempat peribadatan di Desa Tanjung Rambutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Rambutan

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla/Surau	7
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
Jumlah		10

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat tiga buah masjid dan tujuh buah mushalla/surau sebagai sarana ibadah pemeluk agama islam. Sedangkan sarana ibadah pemeluk agama lain tidak ada sesuai dengan tidak adanya pemeluk agama selain islam di Desa Tanjung Rambutan.

IV.3. Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan

Pada dasarnya pemerintahan desa merupakan simbol formil dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan dikepalai oleh seorang kepala desa dan sekretaris desa serta pelaksanaan teknis lainnya. Untuk lebih jelasnya, aparat pelaksanaan pemerintahan Desa Tanjung Rambutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7 Daftar Nama Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan terakhir	Jabatan
1	Yusjar	Laki-laki	SLTA	Kepala Desa
2	Hasyadi	Laki-laki	SLTA	Sekretaris Desa
3	Siti Azizah	Perempuan	SLTA	Kaur. Umum
4	Alirman	Laki-laki	SLTP	Kaur. Pembangunan
5	Ekon Saputra	Laki-laki	SLTA	Kaur. Pemerintahan
6	Erni Yusni	Perempuan	SLTA	Kaur Keuangan
7	M. Syafi'i.B	Laki-laki	SD	Kepala Dusun I
8	Khaidir.Y	Laki-laki	SD	Kepala Dusun II
9	Zamzami, S.Pd	Laki-laki	S.1	Kepala Dusun III
10	Amiruddin	Laki-laki	SLTA	Kepala Dusun IV

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa telah terpenuhi. Adanya kepala desa dan pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari :

1. Kepala Urusan (Kaur) Umum
2. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan
3. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan
4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Selain dari perangkat desa, di Desa Tanjung Rambutan juga dipilih Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) pada tiap-tiap dusun yang ada di Desa Tanjung Rambutan sebagai pembantu dari kepala dusun dalam menjalankan pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8 Daftar Nama-Nama Ketua RW dan RT Desa Tanjung Rambutan

No.	Nama	Jabatan
1	Suhaimi	Ketua RT 1 RW 1 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
2	Abu Kasim	Ketua RT 2 RW 1 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
3	Suardi Syam	Ketua RT 1 RW 1 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
4	Junaidi	Ketua RT 2 RW 1 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
5	Suhaidir	Ketua RT 1 RW 2 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
6	Arisman	Ketua RT 2 RW 2 Dusun I Desa Tanjung Rambutan
7	M. Zen	Ketua RW 1 Dusun II Desa Tanjung Rambutan
8	Marjulis	Ketua RW 2 Dusun II Desa Tanjung Rambutan

9	Zainal	Ketua RT 1 RW 1 Dusun II Desa Tanjung Rambutan
10	H. Bahrum Beni	Ketua RT 2 RW 1 Dusun II Desa Tanjung Rambutan
11	Nurdin	Ketua RT1 RW 2 Dusun II Desa Tanjung Rambutan
12	Sudirman	Ketua RT 2 RW 2 Dusun II Desa Tanjung Rambutan
14	Yusdar	Ketua RW 1 Dusun III Desa Tanjung Rambutan
15	Abdurrahman	Ketua RW 2 Dusun III Desa Tanjung Rambutan
16	H. Zakaria	Ketua RT 1 RW 1 Dusun III Desa Tanjung Rambutan
17	Nasrun.B	Ketua RT 2 RW 1 Dusun III Desa Tanjung Rambutan
18	Suryadi	Ketua RT 1 RW 2 Dusun III Desa Tanjung Rambutan
19	Syafril	Ketua RW 1 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan
20	Hamzah Husin	Ketua RW 2 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan
21	Amirunas	Ketua RT 1 RW 1 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan
22	Jama'an	Ketua RT 2 RW 1 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan
23	Surya Admaja	Ketua RT 1 RW 2 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan
24	Sopian Hadi	Ketua RT 2 RW 2 Dusun IV Desa Tanjung Rambutan

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari empat dusun yang ada di Desa Tanjung Rambutan, tiap-tiap dusun diketuai oleh kepala dusun dan dibantu oleh dua orang RW dan empat orang RT selaku perpanjangan tangan dari kepala dusun.

IV.4. Badan Permusyawaratan Desa

BPD di Desa Tanjung Rambutan berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan golongan

profesi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

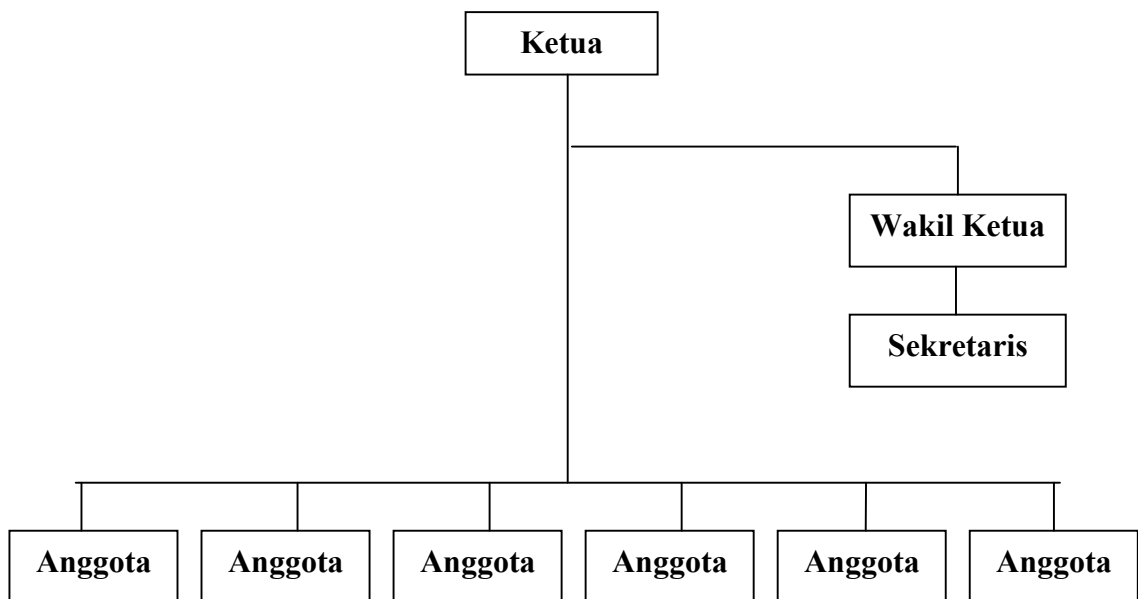
Tabel IV.9 Keanggotaan BPD di Desa Tanjung Rambutan

No.	Nama	Unsur	Jabatan	Pendidikan
1	H. Abdullah Ali	Pemuka agama	Ketua	SMA
2	Syahrudin, S.Ag, S.H	Pemuka Agama	Waka	S1
3	Taslis Athar, A.Ma.Pd	Pemuka Agama	Sekretaris	D2
4	Abu Talib, A.Ma.Pd	Pemuka Masyarakat	Anggota	D2
5	H. Saharudin, S.Pd	Pemuka Masyarakat	Anggota	S1
6	Hasbih, S.Sos	Pemuka Adat	Anggota	S1
7	Abdul Mutalib.Y	Unsur Pemuda	Anggota	SMA
8	Abdullah	Golongan Profesi	Anggota	SMA
9	Hanif Athar	Golongan Profesi	Anggota	SMA

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Komposisi dari BPD di Desa Tanjung Rambutan terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan enam orang anggota. Ini telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1” Pimpinan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris”. Struktur organisasi BPD Desa Tanjung Rambutan dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan I: Struktur Organisasi BPD Desa Tanjung Rambutan

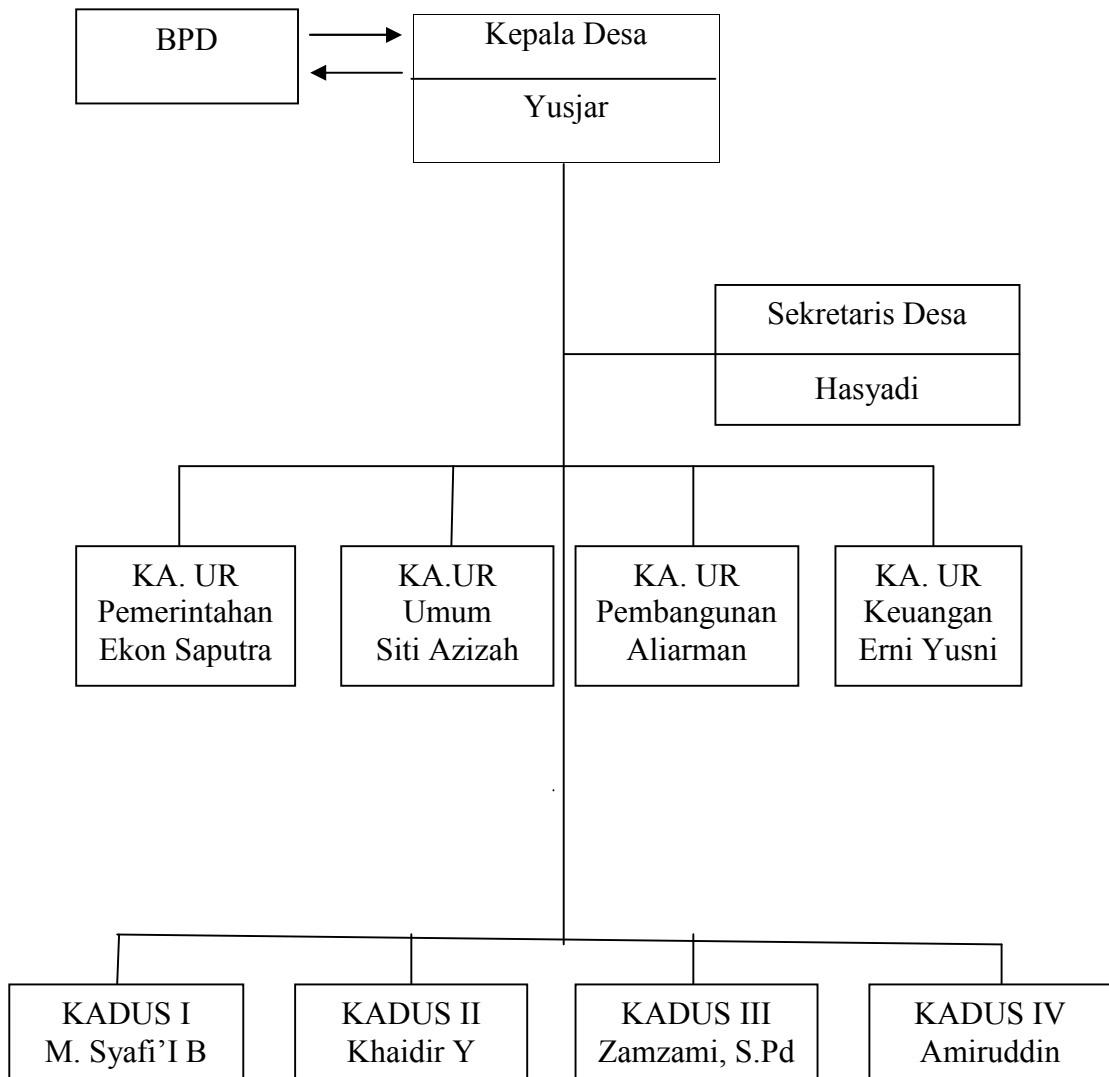


Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis karena secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah NKRI. Di dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kepala desa dibantu oleh lima orang perangkat desa yakni sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan bagian umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan pembangunan.

Selanjutnya organisasi pemerintahan desa sebagaimana ditetapkan Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, BPD dan perangkat desa. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan II: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan



Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa antara BPD dan kepala desa memiliki kedudukan yang sejajar. BPD menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa. Di bawah kepala desa ada sekretaris desa, kepala urusan (Kaur) yang terdiri dari 4 bagian dan kepala dusun sebanyak 4 orang yang semuanya berfungsi untuk membantu kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden

Objektif dan akuratnya data dalam suatu penelitian merupakan landasan dari tercapainya hasil penelitian yang sebenarnya. Sehubungan dengan fungsi BPD, maka perlu diketahui identitas responden baik dari unsur anggota BPD maupun dari masyarakat yang menyangkut tingkat pendidikan, tingkat umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

V.1.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan prioritas utama dalam setiap aktifitas hidup dan kehidupan manusia, karena pendidikan akan sangat menentukan dalam perkembangan manusia baik secara individu apalagi dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk lebih jelasnya pendidikan anggota BPD, Aparat Desa dan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Tingkat Pendidikan Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat

No	Unsur	Jenjang Pendidikan					Jumlah	(%)
		SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana		
1	BPD	-	-	3	2	4	9	100%
2	Aparat Desa	2	1	6	-	1	10	100%
3	Masyarakat	21	16	33	8	17	95	10%
Jumlah		23	17	42	10	22	114	

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Berdasarkan tabel V.1 diketahui bahwa responden menamatkan pendidikan paling rendah adalah SMA sedangkan jenjang pendidikan paling tinggi adalah Sarjana. Maka dapat penulis simpulkan bahwa terhadap tingkat pendidikan dari SD sampai Sarjana tentunya sangat berpengaruh dalam mewujudkan *good governance* dalam masyarakat, karena tingkat pendidikan merupakan faktor utama dari terciptanya sumber daya manusia yang handal serta memiliki pemahaman yang tinggi. Sehingga ini bisa membantu untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas.

V.1.2 Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah responden ditinjau dari jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 Jenis Kelamin Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat

No.	Unsur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	BPD	9	-	9	100%
2	Aparat Desa	8	2	10	100%
3	Masyarakat	68	27	95	10%
Jumlah		85	29	114	

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Tabel V.2 diketahui bahwa jumlah dari mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Ini sangat menunjang untuk membantu ketepatan penulis dalam melakukan penelitian, karena kaum laki-laki lebih banyak mengetahui urusan-urusan yang bersifat kemasyarakatan yang ada dalam pemerintahan desa. Dari sini penulis menilai bahwa terdapatnya 2 orang perempuan yang bekerja sebagai aparat desa sangat berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan yang ada di samping juga

mempunyai fungsi sebagai pelopor kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan seperti PKK dan majlis ta'lim ibu-ibu.

V.1.3 Tingkat Usia

Tabel V.3 Tingkat Usia Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat

No	Unsur	Rentang Usia (Tahun)				Jumlah	Persentase (%)
		15-22	26-36	37-47	>55		
1	BPD	-	-	5	4	9	100%
2	Aparat Desa	-	3	5	2	10	100%
3	Masyarakat	8	29	41	17	95	10%
Jumlah		8	31	51	23	114	

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Pada tabel V.3 diketahui bahwa tingkat usia responden bervariasi mulai dari usia remaja sampai dengan usia lanjut (lansia). Ini bertujuan untuk memperoleh data yang berimbang dari penelitian ini, karena apabila responden hanya diambil dari golongan tua saja maka hasil penelitian kurang akurat. Sebab dalam pemerintahan yang ada di desa tidak hanya mengurus masalah pembangunan semata tetapi juga mencakup berbagai aspek dan dari semua golongan.

V.1.4 Jenis Pekerjaan

Tabel V.4 Jenis Pekerjaan Responden BPD, Aparat Desa dan Masyarakat

No	Unsur	Jenis Pekerjaan				Jumlah	Persentase (%)
		Petani	Buruh	Pedagang	PNS		
1	BPD	2	-	1	6	9	100%
2	Aparat Desa	3	-	4	3	10	100%
3	Masyarakat	63	2	19	11	95	10%
Jumlah		68	2	24	20	114	

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Berdasarkan tabel V.4 diketahui bahwa mayoritas responden berprofesi sebagai petani dan paling sedikit adalah bekerja sebagai buruh sebanyak 2 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih

tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Tingkat perekonomian masyarakat bisa dijadikan salah satu standar dalam menilai seseorang hidup ditengah masyarakat sukses atau tidak. Karena bagaimanapun manusia sebagai makhluk sosial bisa lepas dari interaksi dan hal-hal lain yang bersifat materi.

V.2 Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BPD yang berfungsi membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berarti bahwa BPD mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun peradaban masyarakat desa dan juga dalam menjaga norma dan nilai yang telah ada. Disamping itu BPD juga menjadi titik sentral dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di sisi lain, pemerintah desa merupakan mitra kerja dari BPD, karena sangat tidak mungkin berjalan roda pemerintahan desa apabila antara kedua unsur ini tidak saling menjalin hubungan kerja (kemitraan) dengan baik. Jelasnya apabila antara pemerintah desa dan BPD tidak bersinergi dalam membangun desa, maka akan dapat menimbulkan masalah dan konflik di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh ketidakharmonisan antara kedua unsur ini.

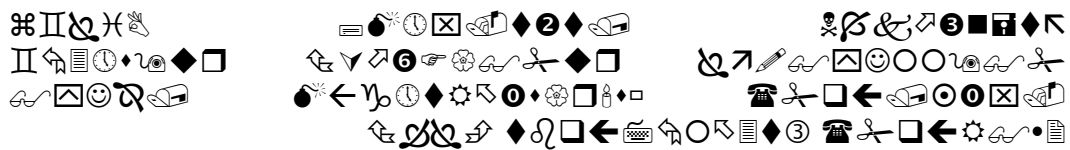
Padahal apabila kita melihat dari konsep *good governance*, hal ini merupakan suatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh masyarakat.

Sebagaimana pendapat Sjahrudin Rasul dalam Jeddawi (2011:25) yang menjelaskan bahwa *good governance* mengandung dua pengertian; *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; *kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Intinya *good governance* yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah.

Maka dalam upaya mewujudkan *good governance* di tingkat desa yang juga sejalan dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa BPD harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin serta melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa agar prinsip *check and balance* dapat berjalan. Jadi baik atau buruknya kinerja BPD jelas akan sangat berpengaruh terhadap sejauh mana desa tersebut telah bisa melaksanakan kehidupan demokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di masyarakat desa.

Sedangkan Allah SWT juga telah menerangkan bahwa apabila baik tatanan (pemerintahan) kehidupan suatu masyarakat, maka Allah berjanji akan melimpahkan berkah-Nya, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-A'Raaf Ayat 96:





Artinya: *Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

V.2.1 Legislasi

Fungsi BPD yang paling utama ialah membuat, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa atau dikenal juga dengan istilah fungsi legislasi. Menurut Pasal 48 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999, bahwa : Ayat (1) rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa atau BPD, Ayat (2) kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dalam menjalankan fungsi legislasi ini BPD sebelumnya haruslah menyampaikan hal-hal yang menyangkut baik kepentingan pribadi, kelompok apalagi untuk kepentingan hidup orang banyak dalam masyarakat, karena peraturan-peraturan yang kemudian akan ditetapkan diharapkan mampu masyarakat untuk menjalankan dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Good governance dalam konsepnya mengemukakan bahwa unsur hukum dan keadilan (*rule of law*) sangatlah diperlukan berkaitan dengan apa saja yang ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat apalagi dalam pembuatan dan penetapan suatu aturan. Karena tanpa memperhatikan aspek hukum dan keadilan, akan sangat memicu terjadinya pententangan dan konflik di masyarakat. Maka sebelum BPD menetapkan peraturan desa hal terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah mempelajari, memahami dan menganalisa dari apa yang

memang betul-betul harus ditetapkan demi menjaga keutuhan, ketertiban dan keamanan masyarakat desa.

Dengan demikian, peraturan desa yang ditetapkan mampu memberikan suasana yang nyaman dalam masyarakat, sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai juga dengan keinginan dari masyarakat, karena yang akan menjalankan peraturan-peraturan tersebut tidak lain adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi BPD sebagai perwakilan dari masyarakat harus lebih profesional dan selektif dalam menjalankan fungsi legislasi ini.

Untuk mengetahui sejauh mana BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menjalankan fungsi legislasi, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan dalam Membuat Rancangan Peraturan Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	14	12,28%
2	Kadang-kadang	18	15,78%
3	Tidak Pernah	65	57,01%
4	Tidak Tahu	17	14,91%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Tabel V.5 memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat sedikit sekali ikut dalam membuat rancangan peraturan desa, sedangkan dalam upaya mewujudkan *good governance* di tingkat desa pertama yang harus dibangun adalah adanya keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga dengan berfungsinya unsur-unsur yang ada, maka akan cepat terwujudnya *good governance*. Karena pada intinya konsep tata pemerintahan yang baik itu tidak lain adalah adanya kerjasama dan saling menguatkan unsur-unsur yang ada.

Sedangkan Sumarto (2004:2) mengatakan bahwa dalam upaya menciptakan *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat. Intinya tuntutan yang lebih besar terletak pada masyarakat, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

Wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak H. Abdullah Ali selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa banyak dari masyarakat maupun dari anggota BPD yang tidak ikut dalam membuat rancangan peraturan desa, hal ini disebabkan oleh keinginan dari masyarakat sendiri yang tidak peduli dengan himbauan untuk mengikuti rapat yang telah diagendakan. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tahapan dan aturan dalam merumuskan peraturan desapun banyak diantara masyarakat dan bahkan anggota BPD tidak mengetahui sama sekali tahapan dan aturan ini. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Tahapan dan Aturan dalam Merumuskan Peraturan Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	11	9,64%
2	Kadang-kadang	9	7,89%
3	Tidak Pernah	59	51,75%
4	Tidak Tahu	35	30,70%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari tabel V. 6 diketahui bahwa 51,75% responden menyatakan tidak mengetahui tahapan dan aturan dalam merumuskan peraturan desa. Hal ini sangat berpeluang untuk terjadinya kesalahan-kesalahan dalam hal aturan perumusan

peraturan desa. Karena dalam konsep *good governance* mengedepankan adanya penegakan aturan dan mekanisme (*rule of law*) dalam membuat kebijakan dan peraturan.

Wawancara tanggal 14 November 2011 dengan Bapak Elvis Zulher selaku Pemuda Desa Tanjung Rambutan memberikan keterangan bahwa masyarakat terkesan enggan dan tidak memenuhi keinginan dari BPD untuk mengikuti berbagai rapat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui sedikitpun tentang apa yang dibuat oleh BPD, ini terbukti dari adanya pertentangan dan protes masyarakat atas keputusan dan aturan-aturan yang telah dibuat. Disamping itu, terkadang jumlah dari peserta rapat yang dilaksanakan BPD juga tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pengambilan keputusan, karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah peserta rapat yang diundang.

Menurut pengamatan penulis, tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukan pengambilan keputusan rapat yang dilakukan oleh BPD akan mengakibatkan terjadi masalah besar apabila masyarakat menuntut untuk adanya pertanggungjawaban dari keputusan yang telah ditetapkan. Karena dalam perspektif *good governance* azas pertanggungjawaban (*accountability*) sangat dituntut untuk menjaga keselarasan antara elemen-elemen yang ada di masyarakat.

Observasi yang penulis lakukan, mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mengetahui tahapan dan aturan dalam merumuskan peraturan desa lebih didasarkan pada unsur BPD yang kurang mengikutsertakan peran serta

masyarakat dalam berbagai rapat-rapat desa. Hal ini terbukti dari keinginan masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPD. Sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Rapat yang Dilaksanakan BPD

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	7	6,14%
2	Kadang-kadang	18	15,78%
3	Tidak Pernah	66	57,89%
4	Tidak Tahu	23	20,17%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Menurut Sumarto (2003:4) bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam upaya perwujudan *good governance* menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan warganya, tidak semata-mata melalui perantara, wakil dalam dewan perwakilan rakyat, atau partai politik saja.

Melihat komunikasi antara masyarakat dan BPD yang kurang baik ini, maka akan sangat tidak mungkin BPD bisa untuk membatalkan peraturan yang telah ada, karena tidak adanya input dari masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan subjek dalam membuat atau membatalkan peraturan yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.8:

Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan dalam Membatalkan Peraturan Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	10	8,77%
2	Kadang-kadang	15	13,15%
3	Tidak Pernah	78	68,42%

4	Tidak Tahu	11	9,64%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Melihat kondisi ini, maka BPD akan sulit untuk melaksanakan tugasnya menyangkut hubungan kepada masyarakat, apalagi untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD bersama kepala desa. Sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.9 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi BPD ke Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	3	2,63%
2	Kadang-kadang	4	3,50%
3	Tidak Pernah	81	71,05%
4	Tidak Tahu	26	22,80%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari jawaban responden secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan komunikasi yang kurang baik antara BPD dengan masyarakat, hal ini disebabkan oleh unsur BPD yang tidak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Legislasi

No	Indikator	S		KK		TP		TT		Total
		F	%	F	%	F	%	F	%	

1	Keikutsertaan membuat perdes	14	12,28	18	15,78	65	57,01	17	14,91	114
2	Tahapan merumuskan perdes	11	9,64	9	7,89	59	51,75	35	30,70	114
3	Kehadiran rapat BPD	7	6,14	18	15,78	66	57,89	23	20,17	114
4	Keikutsertaan membatalkan perdes	10	8,77	15	13,15	78	68,42	11	9,64	114
5	Melakukan sosialisasi perdes	3	2,63	4	3,50	81	71,05	26	22,80	114
Jumlah		45	7,8	64	11,2	349	61,22	112	19,6	570

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Berdasarkan rekapitulasi dari fungsi legislasi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum menjalankan fungsi legislasi dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh komunikasi antara BPD dengan masyarakat tidak berjalan lancar akibat kurangnya BPD mengajak masyarakat untuk ikut dalam membahas rancangan peraturan desa. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V.11 Absensi Rapat BPD Desa Tanjung Rambutan

No.	Bulan	Unsur	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari	Anggota BPD	9	5	4
		Aparat Desa	10	5	5
		Masyarakat	45	18	27
2	Mei	Anggota BPD	9	4	5
		Aparat Desa	10	4	5
		Masyarakat	45	11	34
3	Agustus	Anggota BPD	9	4	5
		Aparat Desa	10	4	6
		Masyarakat	45	14	31

Sumber: Ketua BPD Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

V.2.2 Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi yang kedua setelah fungsi legislasi.

Terlaksananya roda pemerintahan dan pembangunan di desa tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD, pengawasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan pada peraturan desa saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup dari segala aspek yang ada dalam pemerintahan desa. Karena tanpa adanya pengawasan maka akan membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari program perencanaan yang sebelumnya telah disusun, baik itu penyimpangan dalam hal materil maupun moril.

Antara perencanaan (program) yang dibuat oleh BPD, baik dalam bentuk peraturan, program pembangunan dan lainnya tidak akan bisa terlepas dari pengawasan. Hal ini bertujuan sebagai proses pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kontz dan Cyrill O'donnel dalam Siagian (1996:135) mengatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Menurut Siagian (2001:49) pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Berikut tabel tentang BPD dalam

menjalankan fungsi pengawasan:

Tabel V.12 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	5	4,38%
2	Kadang-kadang	9	7,89%
3	Tidak Pernah	79	69,29%
4	Tidak Tahu	21	18,42%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Tabel V.12 diketahui bahwa responden yang tidak pernah ikut dalam mengawasi peraturan desa mencapai angka 69,29%. Pengawasan terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan merupakan wewenang dari BPD sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, tetapi yang terjadi di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan menunjukkan bahwa BPD kurang serius menjalankan tugas dengan baik. Hal ini tentu sangat kecil kemungkinan BPD meminta perwakilan masyarakat untuk ikut dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, sedangkan konsep demokrasi dan *good governance* sangat memandang perlu adanya partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.13 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Mengawasi Roda Pemerintahan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	6	5,26%
2	Kadang-kadang	14	12,28%
3	Tidak Pernah	87	68,42%
4	Tidak Tahu	7	6,14%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Tabel V.13 memperlihatkan angka yang cukup besar yaitu sebanyak 87 responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan dalam

mengawasi roda pemerintahan. Dari angka ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD bertolak belakang dengan konsep *good governance* yang salah satunya adalah bagaimana pemerintah dan publik mempunyai perspektif *good governance* dan melibatkan manusia serta memiliki visi kedepan untuk membangun tatanan kehidupan bersama masyarakat (*strategic vision*).

Salah satu karakteristik yang terdapat dalam konsep *good governance* adalah adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut andil dalam membangun tatanan dan pembangunan pada lingkungan masyarakat, bahkan yang lebih dari itu *good governance* melalui azas partisipasi ini masyarakat mempunyai suara (hak) dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui perantara seperti BPD yang ada di tingkat desa.

Hasil wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak Herizal, S.Hut selaku Pemuka Masyarakat Desa Tanjung Rambutan menerangkan bahwa kurang diikutsertakannya masyarakat dalam memantau pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara masyarakat dengan BPD. Disamping itu antara sesama anggota BPD juga tidak kompak dalam melakukan pengawasan, sehingga hasil dari pengawasanpun tidak sempurna. Akhirnya, sosialisasi kepada masyarakat tidak ada, di samping BPD sendiri banyak tugas-tugas lain yang tidak diketahuinya. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.14 Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	-	-

2	Kadang-kadang	9	7,89%
3	Tidak Pernah	89	78,07%
4	Tidak Tahu	16	14,03%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari tabel V.14 terlihat bahwa hampir 92% persen responden tidak mengetahui sama sekali tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Mestinya BPD yang paling tahu tentang hal ini juga tidak mengetahui sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhoy Tera Era Wadi, SP selaku warga Desa Tanjung Rambutan mengatakan bahwa tidak mengetahuinya masyarakat tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa karena BPD sendiri juga belum menerima laporan tersebut, ini terjadi disamping BPD sendiri tidak bekerja sama sekali juga disebabkan oleh ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD yang disebabkan oleh faktor konflik keluarga antara salah satu anggota BPD dengan keluarga Kepala Desa.

Dari sebagian besar (mayoritas) masyarakat yang tidak pernah sama sekali mengetahui Laporan Pertanggungjawaban kepala desa, mengindikasikan adanya masalah internal dan eksternal yang akhirnya menjadi jurang pemisah antara sesama anggota BPD, BPD dengan pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. (Hasil Observasi lapangan bulan Oktober, November dan Desember 2011).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 14 November 2011 dengan Bapak Yusrizal selaku tokoh Pemuda Desa Tanjung Rambutan menerangkan bahwa masalah-masalah yang ada mengakibatkan tidak adanya pengawasan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan yang

mengatur masalah keamanan dan penyakit masyarakat (pekat), sehingga sangat banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari tidak berjalannya pengawasan dari pihak BPD. Sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.15 Draft Peraturan Desa Masalah Penanganan Pekat

No.	Bentuk Larangan	Sanksi/Denda
1	Judi	Rp. 300.000
2	Miras	Rp. 150.000
3	Zina	Dikeluarkan dari Kampung
4	Pergaulan Bebas	Rp. 250.000
5	Tanggul /Polisi Tidur	Rp. 75.000
6	Sabung Ayam	Rp. 50.000
7	Kebut-kebutan dan Knalpot Modif	Rp. 125.000
8	Buka Warung (Selama Ramadhan)	Rp. 50.000

Sumber: Kantor Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 15 November 2011 dengan Bapak Suparman selaku Warga masyarakat Desa Tanjung Rambutan mengungkapkan bahwa telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dari peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa seperti perjudian, minuman keras, perzinahan dan lainnya yang sekarang semakin menjadi-jadi. Disamping itu kadang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga aparat desa namun tidak diberi denda dan lepas begitu saja, sehingga ini berakibat merajalelanya berbagai macam penyakit masyarakat oleh karena tidak adanya pemberian hukuman yang telah ada, ini terjadi karena pemerintah desa (BPD) tidak menindaklanjuti masalah ini dengan serius.

Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh BPD yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dari BPD itu sendiri, penulis berpandangan bahwa akan sangat sulit terciptanya *good governance* di Desa Tanjung Rambutan karena tidak adanya efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari BPD,

karena efektif dan efisiensinya BPD dalam menjalankan pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan terhadap masyarakat dan pelaksanaan roda pemerintahan yang ada di desa.

Tabel V.16 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	6	5,26%
2	Kadang-kadang	18	15,78%
3	Tidak Pernah	62	54,38%
4	Tidak Tahu	28	24,56%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Tabel V.16 diketahui bahwa sebanyak 78 % responden menyatakan tidak pernah dan tidak tahu dalam ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD dapat dinilai tidak memberikan hasil yang memuaskan dan pengaruh di tengah masyarakat. Untuk mengukur kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.17 Tanggapan Responden Tentang BPD Menjalankan Fungsi Pengawasan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	12	10,52%
2	Kadang-kadang	22	19,29%
3	Tidak Pernah	67	58,77%
4	Tidak Tahu	13	11,40%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Pada tabel V.17 sebanyak 58,77% responden menyatakan BPD tidak pernah menjalankan pengawasan dengan efektif baik terhadap peraturan yang ditetapkan maupun terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak Syaharuddin, S.Ag, SH selaku Wakil Ketua BPD menerangkan bahwa kurang bekerja secara efektifnya BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan ini karena adanya terjadi semacam perbedaan pandangan antara sesama anggota BPD dalam rapat-rapat yang dilaksanakan yang kemudian perbedaan ini menjadi besar akibat masing-masing anggota lebih mengedepankan keegoannya, sehingga menimbulkan perkotakan dalam *intern* BPD. Kondisi seperti ini bertambah parah karena tidak adanya inisiatif dari anggota BPD untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hal ini membuat masyarakat resah, sedangkan masyarakat sendiri merasa tidak diperhatikan karena anggota BPD sudah tidak mampu lagi melakukan pengawasan dengan baik serta mengabaikan masyarakat dalam memberdayakan potensi yang ada.

Tabel V.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Pengawasan

No	Indikator	S		KK		TP		TT		Total
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Pengawasan pelaksanaan	5	4,38	9	7,89	79	69,29	21	18,42	114

	perdes									
2	Masyarakat mengawasi pemerintahan	6	5,26	14	12,28	87	68,42	7	6,14	114
3	Mengetahui LPj kades	-	-	9	7,89	89	78,07	16	14,03	114
4	Mengawassi pelaksanaan Kep. Kades	6	5,26	18	15,78	62	54,38	28	24,56	114
5	BPD menjalankan pengawasan	12	10,52	22	19,29	67	58,77	13	11,40	114
	Jumlah	29	5,08	72	12,62	384	65,7	85	14,9	570

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Hasil dari rekapitulasi data tentang fungsi pengawasan BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memberikan kesimpulan bahwa terjadi hubungan yang tidak baik antara sesama anggota BPD yang disebabkan adanya kepentingan individu dan kelompok sehingga dari kepentingan-kepentingan ini lahirlah masalah dalam tubuh BPD yang sulit untuk diselesaikan, sehingga dari masalah ini muncullah ketidakpuasan dari masyarakat yang menganggap BPD tidak lagi bersifat independen dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, tidak memandang perlu peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan tidak berhasil dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

V.2.3 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada banyak hal yang harus dibangun, baik itu menyangkut pembangunan fisik maupun pembangunan dari segi mental spiritual, baik menyangkut sarana dan prasarana maupun masalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Untuk mewujudkan dan

menyalurkan segala yang diinginkan oleh masyarakat, maka BPD adalah wadah satu-satunya yang berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, maka BPD harus mampu menyerap dan menampung aspirasi dalam bentuk apapun, baik berupa saran, ide/sumbangan pemikiran, dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk kemudian ditindaklanjuti dan dipertimbangkan dalam musyawarah. Setelah BPD melakukan rapat, dari sinilah akan diperoleh hasil dari aspirasi masyarakat berbentuk program pembangunan desa maupun berbentuk peraturan desa.

Menurut Kaloh (2010:172) salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah pemerintahan yang mampu untuk mewujudkan *good governance*, dimana pemerintah sanggup untuk melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreatifitas masyarakat berkembang dan yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintahnya.

Jadi pada era reformasi sekarang, pemerintah sangat dituntut untuk bisa menyalurkan aspirasi yang ada di masyarakat, karena tujuan akhir dari proses menyalurkan aspirasi dari masyarakat adalah pemerintah mampu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh dengan kepentingan masyarakat. Di desa jelas BPDlah yang memiliki peranan ini yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat desa.

Tabel V.19 Tanggapan Responden Tentang BPD Pernah Menampung Aspirasi Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	16	14,03%
2	Kadang-kadang	32	28,07%
3	Tidak Pernah	47	41,22%
4	Tidak Tahu	19	16,66%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari tabel V.19 terlihat dengan jelas bahwa BPD masih belum bekerja maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan *good governance* memandang bahwa pemerintah dalam hal ini BPD harus bersikap (*responsiveness*) peka dan cepat tanggap dalam menampung kritikan dan saran masyarakat serta melayani dengan baik apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak Taufiq Wahyudi, S.Pd selaku Tenaga Pendidik Desa Tanjung Rambutan memandang bahwa kesungguhan BPD belum maksimal, sedangkan masyarakat sangat berharap aspirasi mereka dapat dipertimbangkan dengan profesional. Melihat kurangnya semangat BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga membuat masyarakatpun merasa enggan untuk langsung menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.20 Tanggapan Responden Tentang Menyampaikan Aspirasi Ke BPD

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	11	9,64%
2	Kadang-kadang	27	23,68%
3	Tidak Pernah	68	59,64%
4	Tidak Tahu	8	7,01%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Data pada tabel V.20 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan bahwa 66% responden menyatakan tidak pernah dan bahkan tidak tahu untuk

menyampaikan aspirasi ke BPD. Paradigma *good governance* menilai bahwa dalam upaya mewujudkan *good governance*, masyarakat adalah unsur yang paling menentukan, karena dalam pengambilan kebijakan masyarakat harus lebih mendominasi agar keputusan yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan keinginan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak Taslis Athar, A.Ma.Pd selaku sekretaris BPD memberikan keterangan bahwa faktor utama yang menyebabkan kurangnya anggota BPD dan masyarakat menyampaikan aspirasi disebabkan oleh sebelumnya ada beberapa usulan dari masyarakat yang kurang mendapat sambutan yang baik dari BPD sehingga mengurangi animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.21 Tanggapan Responden Tentang Aspirasi yang Disalurkan Ke Instansi Berwenang

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	7	6,14%
2	Kadang-kadang	17	14,91%
3	Tidak Pernah	73	64,03%
4	Tidak Tahu	17	14,91%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari tabel V.21 dapat dilihat bahwa BPD sangat jarang melakukan proses lanjutan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan wawancara tanggal 6 November 2011 dengan Bapak Khaidir selaku nenek-mamak (tokoh adat) menjelaskan bahwa BPD selama ini belum pernah turun ke masyarakat, padahal banyak usulan masyarakat untuk pembangunan desa yang tidak sampai kepada BPD karena tidak adanya dialog.

Tabel V.22 Tanggapan Responden Tentang BPD Turun Langsung untuk Menampung Aspirasi

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	-	-
2	Kadang-kadang	4	3,50%
3	Tidak Pernah	98	85,96%
4	Tidak Tahu	12	10,52%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Data pada tabel V.22 menunjukkan bahwa BPD tidak pernah sekalipun turun langsung menjumpai masyarakat untuk menampung aspirasi. Tentu ini sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat dan juga tidak mencerminkan semangat *good governance*. Karena dalam pemahaman *good governance* BPD dituntut untuk merespon dengan cepat apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

Wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak H. Abdullah Ali selaku Ketua BPD memberikan alasan bahwa memang tidak pernah secara langsung kami turun ke masyarakat, karena dalam masyarakat ada RW dan dusun tempat masyarakat menyampaikan segala keinginannya, lalu pihak RT/RW dan dusun akan menyampaikan ke pihak BPD. Dari sinilah kami akan menyaring aspirasi mana yang paling urgen untuk diputuskan.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diungkapkan bahwa dalam menciptakan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan BPD tidak hanya cukup dengan menunggu laporan dari RT atau RW saja, karena penerapan seperti ini dinilai tidak efektif dan efisien dalam upaya menampung aspirasi masyarakat, sedangkan dalam masyarakat terdapat keinginan dan tuntutan yang beragam. Sementara konsep dari *good governance* menuntut untuk adanya *consensus orientation* yaitu ada lahirnya kebijakan yang memang berasal dari dan atas keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Hasil wawancara tanggal 7 November 2011 dengan Bapak Herizal, S.Hut, selaku Pemuka Masyarakat mengungkapkan bahwa beberapa bulan terakhir hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat sedikit memanas hal ini bermula dari dibiarkannya beroperasi alat-alat berat masuk kedalam kampung yang menyebabkan ruas dan badan jalan yang semula baik menjadi rusak. Masyarakat merasa dirugikan sehingga banyak masyarakat mengeluhkan dan menuntut BPD karena membiarkan tanpa ada tindakan preventif.

Kemudian dari hasil wawancara tanggal 17 November 2011 dengan Bapak Dailani selaku penasehat adat mengungkapkan bahwa faktor utama terjadinya hubungan yang kurang baik antara BPD dengan masyarakat ini adalah tidak adanya keseriusan dari BPD dalam melaksanakan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh, terlebih yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga banyak diantara peraturan maupun program yang dihasilkan oleh BPD yang tidak bersesuaian dengan keinginan masyarakat. Sebagaimana tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel V.23 Tanggapan Responden Tentang BPD Menetapkan Peraturan/Program Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	12	10,52%
2	Kadang-kadang	42	36,84%
3	Tidak Pernah	47	41,22%
4	Tidak Tahu	13	14,40%
Jumlah		114	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Pada tabel V.23 terlihat jelas bahwa BPD masih belum maksimal dalam menetapkan peraturan dan membuat program pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan prinsip *consensus*

orientation yang dimiliki *good governance* yang memiliki pemahaman bahwa *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

Tabel V.24 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

No	Indikator	S		KK		TP		TT		Total
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1	BPD pernah menampung aspirasi	16	14,03	32	28,07	47	41,22	19	16,66	114
2	Masyarakat pernah menyampaikan aspirasi	11	9,64	27	23,68	68	59,64	8	7,01	114
3	Aspirasi pernah disampaikan ke instansi berwenang	7	6,14	17	14,91	73	64,03	17	14,91	114
4	BPD turun ke masyarakat menampung aspirasi	-	-	4	3,50	98	85,96	12	10,52	114
5	Menetapkan peraturan/program sesuai aspirasi	12	10,52	42	36,84	47	41,22	13	14,40	114
Jumlah		46	8,06	122	21,4	333	58,4	69	12,7	570

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

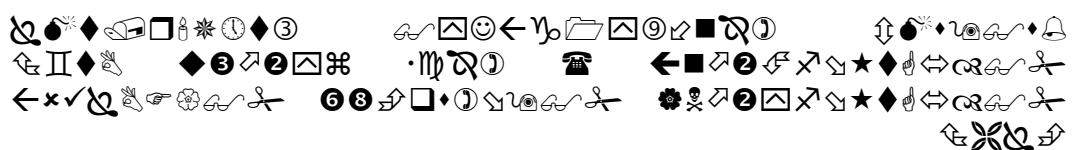
Dari hasil rekapitulasi data tentang fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat memberi pemahaman kepada penulis bahwa BPD Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tidak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan

kesenjangan antara masyarakat dengan BPD, akhirnya masyarakatpun enggan untuk menyampaikan aspirasi. Disamping itu, sikap yang cuek dari BPD juga menambah rasa tidak senang/puas dari masyarakat, karena hampir tidak sekalipun BPD turun langsung menemui masyarakat untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pembangunan desa.

Padahal Kaloh (2010:173) mengatakan bahwa tantangan ke depan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan pengelolaan pemerintahan yang melayani masyarakat (*good governance*). Asumsinya adalah jika masyarakat merasakan bahwa pengelolaan pemerintahan berlangsung secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang diberikan, maka tentunya masyarakat akan melihat pemerintahannya adalah suatu rahmat/berkat.

Apabila hal ini dilihat dari kacamata agama Islam, jelas sangat bertentangan dengan Syari'at Islam.

Menurut Prof. DR. H. M. Quraish Shihab, MA dalam Syafe'i (2000:140) dari celah Ayat Al-Qur'an ditemukan sedikitnya ada dua pokok sifat yang harus disandang oleh seseorang yang memikul suatu jabatan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang hal itu adalah ungkapan dari putri Nabi Syu'aib yang dibenarkan dan diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 26:



Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling baik engkau tugaskan adalah yang kuat lagi dapat dipercaya.*

V.3 Rekapitulasi Tanggapan Reponden Tentang Fungsi BPD Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Tabel V.25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Fungsi BPD Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No.	Sub Variabel	S	KK	TP	TT
1	Legislasi	45 (12,66%)	64 (8,90%)	349 (61,22%)	112 (19,64%)
2	Pengawasan	29 (5,08%)	72 (12,63%)	384 (67,38%)	85 (14,91%)
3	Menyalurkan Aspirasi	46 (8,07%)	122 (21,40%)	333 (58,42%)	69 (12,10%)
	Jumlah	120 (8,60%)	258 (14,31%)	1.066 (62,34%)	266 (15,55%)

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Hasil dari keseluruhan rekapitulasi tanggapan responden tentang fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar di atas dapat dilihat bahwa akumulasi dari pilihan jawaban angket secara keseluruhan yaitu:

1. Menyatakan sering sebanyak 120 orang (8,60%)
2. Menyatakan kadang-kadang sebanyak 285 orang (14,31%)
3. Menyatakan tidak pernah sebanyak 1.066 orang (62,34%)
4. Menyatakan tidak tahu sebanyak 226 orang (15,55%)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan secara utuh bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat belum berfungsi dengan baik.

V.4 Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan belum berfungsinya dengan baik BPD dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar kabupaten Kampar berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan analisa dan temuan-temuan di lapangan sebagai berikut:

V.4.1 Faktor Internal BPD

a. Kurangnya komunikasi.

Komunikasi merupakan urat nadi dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya komunikasi maka organisasi akan mengalami masalah-masalah internal yang berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan sampai anggota dalam organisasi kembali menjalin komunikasi dengan intens. Tidak akan bergerak suatu organisasi tanpa adanya komunikasi. Apalagi untuk membuat suatu perencanaan dan program pembangunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 November 2011 dengan Bapak Saharuddin, S.Pd selaku Anggota BPD menerangkan bahwa kurang baiknya komunikasi antara anggota BPD ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan-kepentingan individu dan kelompok yang dikedepankan dalam rapat-rapat, baik rapat masalah Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) maupun masalah

peraturan dan program pembangunan desa. Sehingga dari sinilah mulai renggangnya hubungan komunikasi antara anggota BPD.

b. Kurangnya koordinasi.

Koordinasi adalah tahapan setelah adanya komunikasi, koordinasi sulit dilakukan apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik. Sejalan dengan tidak adanya komunikasi antara anggota BPD Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, maka koordinasi pun juga tidak dapat dilakukan.

Good governance yang efektif dan efisien menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*good governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2003:2).

Berdasarkan wawancara tanggal 12 November 2011 dengan Bapak Syaharuddin, S.Ag, SH selaku Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Rambutan mengatakan disamping komunikasi yang memang sangat jarang, aktifitas menyangkut pekerjaan (profesi) juga menjadi hambatan anggota BPD untuk melakukan koordinasi. Karena sebagian anggota BPD Tanjung Rambutan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang bekerja sebagai tenaga pendidik maupun sebagai pegawai kantoran. Sehingga alokasi waktu untuk mengadakan rapat-rapat koordinasi sulit untuk dijadwalkan disebabkan masing-masing anggota BPD disibukkan dengan urusan dan kepentingan masing-masing.

c. Kurangnya sarana dan prasarana.

Promotor dari sebuah organisasi adalah adanya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana ini baru akan bisa dibangun apabila ada dana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 11 November 2011 dengan Bapak Taslis Athar, A.Ma.Pd selaku Sekretaris BPD Tanjung Rambutan memberikan penuturan bahwa BPD saat ini masih sulit untuk bekerja karena terkendala masalah sarana dan prasarana yang diperlukan, hal ini disebabkan oleh dana untuk pengadaan keperluan sangat minim, karena anggaran dana untuk pembiayaan keperluan peralatan dan operasional hanya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sedangkan keperluan-keperluan lain yang lebih mendesak menyangkut keperluan masyarakat masih banyak. Disamping itu, sampai sekarang BPD belum memiliki kantor sendiri, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan tugas-tugasnya terutama untuk mengadakan rapat, karena rapat yang selama ini dilaksanakan terpaksa dilokasikan kerumah-rumah anggota BPD. Sementara itu keperluan-keperluan lain seperti meja, kursi, lemari tempat menyimpan arsip, mesin ketik/komputer dan kendaraan operasional juga belum ada. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel V.26 Sarana dan Prasarana BPD di Desa Tanjung Rambutan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kantor	Tidak ada

2	Meja	Tidak ada
3	Kursi	Tidak ada
4	Lemari	Tidak ada
5	Arsip dan dokumen	Ada
6	Mesin ketik/komputer	Tidak ada
7	Kendaraan operasional	Tidak ada

Sumber: BPD Desa Tanjung Rambutan Tahun 2011

V.4.2 Faktor Eksternal BPD

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan desa, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat percepatan pembangunan yang ada di desa, begitu pula sebaliknya, karena BPD dan pemerintah desa melakukan kerjasama dalam menjalankan roda pembangunan di desa hanyalah sebagai administrator dan fasilitator dalam upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam upaya pencapaian tujuan tersebut tidak bisa terwujud dengan sendirinya tanpa adanya peran serta masyarakat. Jadi yang sangat diperlukan dalam memajukan desa adalah adanya kerjasama dari masyarakat dengan BPD sebagai yang mewakili aspirasi masyarakat dan juga pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 11 November 2011 dengan Bapak Syaharuddin, S.Ag, SH selaku Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Rambutan menyatakan bahwa hal yang menjadi kendala

berarti saat ini dirasakan oleh BPD di Desa Tanjung Rambutan adalah kurang antusiasnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada BPD, sehingga peraturan desa dan program pembangunan yang ada kadang sering kali mengalami pertentangan dari masyarakat, karena masyarakat menilai peraturan desa dan program pembangunan yang telah ditetapkan kurang menyentuh dengan kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya kesalahan ini berasal dari masyarakat sendiri yang tidak berpartisipasi dalam rapat yang telah dilaksanakan untuk menyampaikan segala keinginannya kepada BPD.

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi BPD yang meliputi legislasi, melakukan pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Legislasi

Fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban terbanyak responden dengan jumlah 349 orang (61,22%) menyatakan tidak pernah. Adapun yang menjadi kendala adalah BPD tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan dan program pembangunan desa, sehingga seringkali peraturan yang telah ditetapkan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang dilaksanakan.

- b. Pengawasan

Fungsi pengawasan BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar masih belum sempurna. Hal ini terlihat dari jawaban terbanyak responden dengan jumlah 384 orang (67,38%) menyatakan tidak pernah. Adapun yang menjadi

permasalahan adalah masyarakat kurang diikutsertakannya dalam memantau pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara masyarakat dengan BPD. Disamping itu terjadi semacam perbedaan pandangan antara sesama anggota BPD dalam rapat-rapat yang dilaksanakan yang kemudian perbedaan ini menjadi besar akibat masing-masing anggota lebih mengedepankan keegoannya, sehingga menimbulkan perkotakan dalam *intern* BPD. Kondisi seperti ini bertambah parah karena tidak adanya inisiatif dari anggota BPD untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sehingga hasil dari pengawasanpun tidak sempurna.

c. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi BPD Desa di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban terbanyak responden dengan jumlah 333 orang (58,42%) menyatakan tidak pernah. Adapun penyebab dari fungsi ini tidak baik adalah BPD tidak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan BPD, akhirnya masyarakatkanpun enggan untuk menyampaikan aspirasi. Disamping itu, sikap yang cuek dari BPD juga menambah rasa tidak senang/puas dari masyarakat, karena hampir tidak sekalipun BPD turun langsung menemui masyarakat untuk menampung aspirasi dan

keinginan masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah:
 - a. Faktor internal BPD disebabkan oleh:
 1. Kurangnya komunikasi
 2. Kurangnya koordinasi
 3. Kurangnya sarana dan prasarana
 - b. Faktor eksternal BPD ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat.

VI.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis kepada BPD dan juga masyarakat di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah:

1. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar maka BPD bersama pemerintah desa hendaknya saling melakukan kerjasama dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan tanggap dalam menyerap aspirasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan proporsional.
2. Agar secepatnya BPD melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sesama anggota untuk bisa dengan fokus melaksanakan fungsi dengan baik. Karena apabila komunikasi antara sesama anggota BPD terputus hanya karena kepentingan individu dan kelompok maka pembangunan desa akan semakin tersendat dan masyarakat akan semakin dirugikan.

3. Untuk berjalannya tugas dan fungsi dari BPD dengan lancar maka pemerintah desa dalam hal ini kepala desa haruslah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk dapat mengalokasikan dana dalam memenuhi segala sarana dan prasarana yang diperlukan oleh BPD, agar kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dapat teratasi.
4. Kepada masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah-musyawarah desa dan dalam pembangunan yang telah ditetapkan serta mendukung pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan ikut mengawasi serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada BPD agar tujuan hidup bermasyarakat dapat terwujud.

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan I : Struktur Organisasi BPD Desa Tanjung Rambutan	43
Bagan II : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan	44

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surat Al-A'Raaf Ayat 96

_____ *Surat Ali 'Imran Ayat 159*

_____ *Surat Al-Maidah Ayat 2*

_____ *Surat Al-Qashash Ayat 26*

_____ *Surat An-Nahl Ayat 90*

_____ *Surat Ar-Ra'd Ayat 11*

BUKU

Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,
Konstitusi Press, Jakarta, 2007

Gie The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik
Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1982

Jeddawi Murtir, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Total
Media, Yogyakarta, 2011

Kaloh J, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku
Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010

Ndraha Taliziduhu, *Kybernalogi (Ilmu Pemerintahan)*, Rineka Cipta, Jakarta,
2003

Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.
Grasindo, Jakarta, 2005

Putra Fadillah, *Senjakala Good Governance*, Averroes Press, Malang, 2009

Rivai Veitzal, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003

Siagian P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta,
1996

_____, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, 2000

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003

Sumarto Hetifah Sj, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003

Syafi'i Rahmat, *Al-hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Thoha Miftah, *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Sinar Baru, Bandung, 1990

Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa Marga*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003

_____, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002

JURNAL

Kusworo, *Kajian Tentang Perubahan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, No. ISSN 1829-5193

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Pasal 48 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 7 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 216 Ayat 1 Tentang Desa Tahun 2005

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004